

Desentralisasi dan Pemberdayaan Ekonomi: Sinergitas Administrasi Publik dan Sosiologi dalam Membangun Desa Mandiri

Didin Hadi Saputra^{1*}, M. Nasuhi², Mufidah³, Sri Linda Holiza⁴,
Aulia Erfina⁵, Muniati Sulam⁶, Syafi'i⁷

¹⁻⁶ Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

* didinh@unwmataram.ac.id

Abstrak

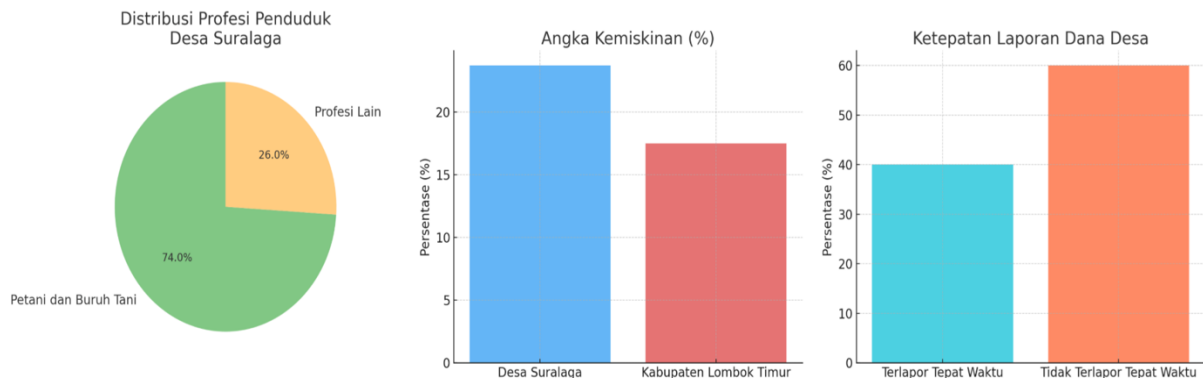
Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya tata kelola administrasi desa, minimnya pemberdayaan ekonomi lokal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta membentuk ruang-ruang partisipasi masyarakat melalui pendekatan sosial yang kolaboratif. Metode pelaksanaan kegiatan melibatkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif melalui tahapan persiapan, penyuluhan, pelatihan dan workshop, pendampingan, serta demonstrasi dan *pilot project*. Kegiatan ini diikuti oleh 20 aparatur desa, 30 pemuda pelaku usaha, dan lebih dari 50 warga dari berbagai kelompok sosial. Hasil utama yang diperoleh adalah meningkatnya kapasitas aparatur desa sebesar 43% (berdasarkan pre-test dan post-test), terbentuknya dokumen perencanaan desa partisipatif berbasis sistem informasi desa, serta lahirnya dua unit usaha baru yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat. Kegiatan ini juga mendorong peningkatan partisipasi warga dalam musyawarah desa, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan lansia. Kesimpulannya, kegiatan ini memperlihatkan keberhasilan dalam membangun ekosistem desa yang transparan, berdaya, dan partisipatif, dengan kontribusi penting berupa integrasi data digital dalam perencanaan desa serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Kata Kunci: *tata kelola desa partisipatif, sistem informasi desa, ekonomi lokal berbasis komunitas, penguatan kelembagaan desa, inovasi sosial pedesaan*

Pendahuluan

Pembangunan desa menjadi fokus strategis dalam kerangka desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus potensi wilayahnya (Nihayah et al., 2024). Namun, kenyataannya banyak desa masih menghadapi tantangan struktural dalam pengelolaan pemerintahan dan pengembangan ekonomi lokal. Salah satu contoh nyata terdapat di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur], yang menjadi mitra dalam program pengabdian ini (Eva Anggraini, 2021).

Berdasarkan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) 2023, Desa Suralaga memiliki jumlah penduduk 9.184 jiwa, dengan mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani (74%). Meskipun memiliki potensi lahan pertanian dan sumber daya manusia yang besar, angka kemiskinan desa mencapai 23,7%, lebih tinggi dari rata-rata kabupaten sebesar 17,5% (BPS Lombok Timur, 2023). Di sisi administrasi, kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa juga masih rendah. Hasil audit Inspektorat Kabupaten pada 2022 mencatat 60% dari program dana desa tidak memiliki laporan pemanfaatan yang tepat waktu dan terdokumentasi.



Gambar 1. Profil Desa Suralaga 2023

Desa mitra dalam program ini menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang saling berkaitan dan menghambat terwujudnya kemandirian desa secara menyeluruh (Kardina et al., 2024). Pertama, lemahnya sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan desa menjadi kendala utama, terutama dalam aspek perencanaan, pelaporan, serta akuntabilitas penggunaan dana desa (Rizky Akbar Prasajo, 2015). Hal ini mengakibatkan rendahnya efektivitas program-program pembangunan yang dijalankan. Kedua, inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pemetaan sosial-ekonomi serta belum terbangunnya sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat desa. Ketiga, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa turut memperparah kondisi tersebut. Pola relasi sosial yang hierarkis dan dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan menyebabkan warga merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk terlibat secara aktif, sehingga pembangunan desa cenderung bersifat top-down dan tidak berbasis kebutuhan nyata masyarakat (Sumardi, 2014). Ketiga permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk dapat diatasi secara efektif.

Melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan keilmuan Administrasi Publik dan Sosiologi, program pengabdian ini menawarkan solusi strategis berupa *Program Sinergitas Administrasi dan Ekonomi Desa Mandiri (SAED-Mandiri)*. Program ini dirancang untuk menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan desa dan rendahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan. Terdapat tiga komponen utama dalam program ini (Hastutik et al., 2021). Pertama, pelatihan dan pendampingan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital dan partisipatif, yang mencakup optimalisasi penggunaan aplikasi

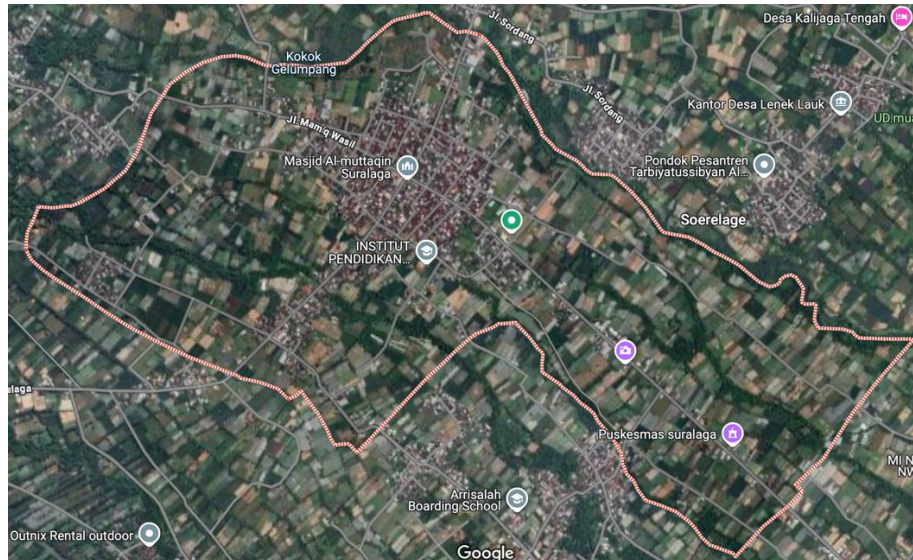
Sistem Informasi Desa (SID) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan data kependudukan (Supandi, 2023). Kedua, pemetaan potensi ekonomi lokal yang dilanjutkan dengan pengembangan unit usaha berbasis komunitas, seperti koperasi pemuda dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang fokus pada pengolahan hasil pertanian sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi desa. Ketiga, pembangunan forum warga dan penyelenggaraan dialog sosial secara berkala guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa (Supandi, 2023). Sinergi dari ketiga komponen tersebut diharapkan dapat menciptakan model pemberdayaan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Sofyanoor, 2014).

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas tata kelola administrasi pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga setiap proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa dapat dijalankan secara efektif dan sesuai prinsip *good governance* (Suhardi, 2025). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan unit usaha lokal yang berbasis pada potensi sumber daya dan jaringan sosial yang dimiliki desa, seperti pengembangan koperasi dan BUMDes (Rohim, 2024). Di sisi lain, pendekatan sosiologis digunakan untuk membangun ekosistem sosial yang kolaboratif dengan menciptakan ruang-ruang partisipasi warga dalam proses pembangunan, sehingga mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat (Supit, n.d.).

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain adalah terwujudnya desa mitra sebagai model *Desa Mandiri* yang mampu mengelola sumber daya lokal secara efektif dan berkelanjutan (Sahrul et al., 2023). Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan dari sektor-sektor ekonomi produktif yang dikembangkan (Yusdiyanto, 2012). Selain itu, kegiatan ini akan menumbuhkan kesadaran kritis dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, sehingga tercipta tata kelola desa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Setyobudi, 2025).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini dipilih berdasarkan hasil analisis situasi dan identifikasi permasalahan yang relevan dengan tujuan kegiatan. Lokasi ini memiliki potensi pertanian yang besar, namun menghadapi kendala dalam tata kelola administrasi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan telah dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari Mei 2025 hingga Juni 2025. Rangkaian kegiatan terbagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan inti, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut.



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan

Khalayak sasaran dalam program ini adalah pemerintah desa, pengelola BUMDes, pemuda desa, serta kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk berwirausaha atau telah menjalankan usaha mikro. Penentuan mitra dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Kepala Desa Suralaga, dilanjutkan dengan FGD awal bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda lokal untuk menetapkan kelompok sasaran prioritas berdasarkan peran strategis mereka dalam penguatan tata kelola dan ekonomi desa. Selain itu, pemilihan mitra juga mempertimbangkan kesiapan partisipasi, aksesibilitas, dan potensi replikasi kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif, yang mengedepankan keterlibatan aktif dari pemerintah desa, kelompok masyarakat, pemuda, serta pelaku usaha lokal dalam setiap tahapan kegiatan. Tahapan pertama dimulai dengan persiapan, yang mencakup koordinasi awal dengan pemerintah desa untuk menyamakan visi dan tujuan kegiatan, dilanjutkan dengan pemetaan sosial dan ekonomi guna mengidentifikasi permasalahan dan potensi desa secara komprehensif. Di tahap ini juga disusun modul pelatihan yang berbasis kebutuhan lokal, agar materi yang disampaikan relevan dan aplikatif.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan, yang bertujuan memberikan pemahaman dasar kepada para peserta mengenai pentingnya tata kelola desa yang baik, pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID), pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Setelah itu, dilakukan pelatihan dan workshop secara intensif. Aparatur desa diberikan pelatihan teknis mengenai penggunaan SID dan penyusunan dokumen perencanaan desa yang partisipatif seperti RPJMDes dan RKPDes. Sementara itu, kelompok pemuda dan pelaku usaha lokal difasilitasi dalam pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha untuk mendukung pengembangan unit usaha produktif.

Tahap berikutnya adalah pendampingan dan monitoring, yang dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana dan kebutuhan di lapangan tetap terakomodasi. Pendampingan mencakup penyusunan dokumen

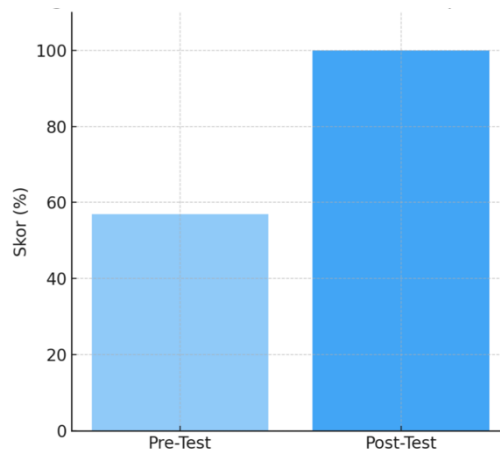
administrasi desa, penguatan kelembagaan ekonomi seperti BUMDes, serta pengorganisasian forum warga sebagai wadah partisipasi sosial. Sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan program, dilakukan tahap demonstrasi dan pilot project berupa pembentukan kelompok usaha berbasis pertanian atau kerajinan lokal, serta pelaksanaan simulasi musyawarah desa partisipatif. Tahapan ini menjadi ruang praktik nyata bagi peserta untuk menerapkan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh, sekaligus menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur melalui sejumlah indikator terukur yang mencerminkan capaian nyata di tingkat desa. Indikator pertama adalah terbentuknya dokumen rencana pembangunan desa secara partisipatif, yakni RPJMDes dan RKPDes, yang disusun berdasarkan data yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Desa (SID), sehingga perencanaan lebih berbasis bukti dan kebutuhan riil masyarakat. Indikator kedua adalah meningkatnya keterlibatan warga dalam forum musyawarah desa, yang dinilai dari jumlah partisipan yang hadir serta tingkat keterwakilan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan. Indikator ketiga adalah tumbuhnya unit usaha baru atau menguatnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dibuktikan dengan adanya dokumen legalitas usaha, penyusunan rencana bisnis, serta kemampuan menyusun pelaporan keuangan secara sederhana. Terakhir, keberhasilan juga diukur dari peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat, yang ditunjukkan melalui hasil pre-test dan post-test pada pelatihan, sebagai tolok ukur peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam aspek administrasi, tata kelola, dan kewirausahaan desa.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Suralaga menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) dan penyusunan dokumen perencanaan partisipatif. Hal ini ditunjukkan dengan tersusunnya dokumen RPJMDes dan RKPDes yang berbasis data digital, serta lebih inklusif karena melibatkan warga dalam proses musyawarah. Selain itu, kegiatan pelatihan dan workshop berhasil mendorong pemuda serta pelaku usaha lokal untuk membentuk dua unit usaha baru berbasis olahan hasil pertanian dan kerajinan bambu. Unit-unit usaha ini juga telah dilengkapi dengan rencana bisnis sederhana dan mendapatkan dukungan dari BUMDes.

Secara sistematis, pembahasan dimulai dari keberhasilan umum yaitu peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari peningkatan skor post-test aparatur desa yang rata-rata naik 43% dibandingkan nilai pre-test, menandakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan pembangunan. Secara spesifik, SID berhasil dimanfaatkan untuk memperbaiki akurasi data kependudukan, pendataan rumah tangga miskin, serta pengelolaan dana desa. Peningkatan transparansi ini menjadi penting karena sebelumnya, berdasarkan audit Inspektorat 2022, 60% program dana desa tidak terdokumentasi dengan baik.



Gambar 3. Perbandingan Skor Pre-test dan Post-test

Pada aspek pemberdayaan ekonomi, partisipasi pemuda dalam pelatihan wirausaha menghasilkan dampak nyata, dengan terbentuknya dua kelompok usaha: satu di bidang produk makanan olahan berbasis jagung lokal, dan satu lagi di bidang anyaman bambu. Kedua kelompok ini berhasil menyusun rencana bisnis yang mencakup analisis pasar, manajemen produksi, serta sistem pembukuan sederhana. Keberadaan unit usaha baru ini tidak hanya menjadi potensi pendapatan tambahan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal berbasis komunitas.

Kegiatan juga menunjukkan keberhasilan dalam membangun ekosistem sosial yang lebih partisipatif. Forum warga yang dibentuk selama kegiatan menjadi wadah diskusi bulanan yang melibatkan perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan desa. Partisipasi warga meningkat hingga 68% pada forum musyawarah desa dibandingkan kegiatan sebelumnya, dengan adanya peningkatan keterwakilan kelompok rentan sebesar 35%. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis yang diterapkan dalam program mampu membuka ruang dialog yang lebih setara antara pemerintah desa dan masyarakat.

Semua hasil tersebut memiliki relevansi kuat dengan teori administrasi publik partisipatif dan teori sosiologi pembangunan yang menekankan pentingnya relasi sosial dan kolaborasi dalam pembangunan desa. Kebermanfaatan kegiatan secara langsung dirasakan oleh mitra, baik dari sisi peningkatan kapasitas birokrasi, penguatan ekonomi masyarakat, hingga tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik yang dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik permasalahan serupa. Jika diperlukan, dokumentasi hasil kegiatan dapat disajikan melalui tabel perkembangan kapasitas, grafik partisipasi warga, peta sosial-ekonomi, serta skema model penguatan ekosistem desa mandiri.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian melalui Program Sinergitas Administrasi dan Ekonomi Desa Mandiri (SAED-Mandiri) berhasil meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan partisipatif, serta mendorong penguatan ekonomi lokal

berbasis komunitas. Hal baru dari kegiatan ini adalah integrasi pendekatan interdisipliner antara Administrasi Publik dan Sosiologi dalam membangun ekosistem pemerintahan desa yang inklusif dan produktif. Manfaat nyata dirasakan oleh aparat desa yang kini lebih terampil menggunakan Sistem Informasi Desa (SID), serta kelompok masyarakat yang mulai menginisiasi unit usaha baru berbasis potensi lokal. Secara teoritik, kegiatan ini memberikan kontribusi pada pengembangan model tata kelola kolaboratif berbasis data dan relasi sosial.

Sebagai rekomendasi, kegiatan pengabdian berikutnya perlu memperluas cakupan pada integrasi perencanaan digital dan monitoring berbasis real-time, serta memperkuat kelembagaan ekonomi desa agar memiliki jejaring pemasaran yang berkelanjutan. Pelibatan lebih luas kelompok perempuan dan pemuda juga direkomendasikan untuk memperkuat keberlanjutan program.

Ucapan Terimakasih

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Nahdlatul Wathan Mataram atas dukungan penuh yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Tanpa fasilitasi, arahan akademik, serta dukungan kelembagaan dari universitas, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan optimal. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada tim pengabdian untuk menjadi bagian dari upaya nyata pemberdayaan masyarakat desa. Semoga kerja sama dan sinergi ini dapat terus berlanjut demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, berdaya, dan berkeadilan sosial.

Referensi

- Anggraini, E. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Perdesaan*.
- Hastutik, D., Padmaningrum, D., & Wibowo, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 45(1), 46. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539>
- Kardina, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Implementasi Desentralisasi Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Di Indonesia. In *Jurnal Professional* (Vol. 11, Issue 2).
- Nihayah, A. N., Rahmayani, D., Marpaung, G. N., & Ayuntavia, A. (2024). Uni.Corn: Membangun Desa Mandiri Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Jragung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 212. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i1.51316>
- Rizky Akbar Prasajo. (2015). *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*.
- Rohim, A. (2024). Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Pattimura Legal Journal*, 3(3), 178–191. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16700>

- Sahrul, M., Setiawan, D., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1).
- Setyobudi, T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 824–843. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i3.8629>
- Sofyanoor, A. (2014). Pengaturan Desa dalam Perspektif Law as an Allocative System. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Suhardi, P. P. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 3(1), 42–55.
- Sumardi. (2014). *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Konsep, Teori, dan Aplikasinya)* (Adi Nugroho Susanto Putro, Ed.; Vol. 1). Penerbit Tahta Media Group.
- Supandi, D. (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3731. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697>
- Supit, B. F. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Administrasi Publik Tahta Media Group*.
- Yusdiyanto. (2012). Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–11.